
PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK DAN PENDIDIKAN PEMILIH TERHADAP KOMPETENSI DEMOKRATIS PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN MAGELANG

Satria Fawaz Miqdad¹, Nur Hidayat Sardini²

¹²Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Email: satriaawaz@student.undip.ac.id | nurhidayatsardini@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendidikan politik dan pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokratis pemilih pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Magelang. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya tingkat partisipasi elektoral yang mencapai 83 persen, namun belum diimbangi dengan kualitas keputusan pemilih yang memadai — sebagaimana ditunjukkan oleh masih maraknya praktik politik uang dan rendahnya literasi politik masyarakat. Penelitian menggunakan metode kuantitatif eksplanatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 91 responden yang tersebar di 21 kecamatan menggunakan proportionate stratified random sampling. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pendidikan politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi demokratis pemilih ($B=0,489$; $t=6,639$; $\text{sig.}=0,000$); (2) pendidikan pemilih berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi demokratis pemilih ($B=0,488$; $t=4,055$; $\text{sig.}=0,000$); dan (3) secara simultan keduanya berpengaruh signifikan dengan nilai $F=68,613$ dan $\text{Adjusted } R^2=0,600$, menunjukkan bahwa 60 persen variasi kompetensi demokratis pemilih dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Analisis komparatif berbasis karakteristik wilayah menggunakan One-Way ANOVA menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan kompetensi demokratis antara wilayah urban, semi-urban, dan rural ($p>0,05$), mengindikasikan bahwa distribusi kompetensi demokratis bersifat merata secara geografis. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan politik dan pendidikan pemilih merupakan instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih substantif.

Kata Kunci: Pendidikan Politik; Pendidikan Pemilih; Kompetensi Demokratis; Pemilu 2024; Kabupaten Magelang

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of political education and voter education on voters' democratic competence in the 2024 General Election in Magelang Regency. The study is motivated by the high level of electoral participation at 83 percent, which has yet to be accompanied by adequate quality of voter decision-making — as evidenced by the persistence of vote-buying practices and low political literacy. The study employs an explanatory quantitative method, collecting data through questionnaires distributed to 91 respondents across 21 sub-districts using proportionate stratified random sampling. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results show that: (1) political education has a positive and significant effect on voters' democratic competence ($B=0.489$; $t=6.639$; $\text{sig.}=0.000$); (2) voter education has a positive and significant effect ($B=0.488$; $t=4.055$; $\text{sig.}=0.000$); and (3) both variables simultaneously have a significant effect ($F=68.613$; $\text{Adjusted } R^2=0.600$), indicating that 60 percent of the variation in democratic competence is explained by both variables. A One-Way ANOVA comparative analysis based on territorial characteristics found no significant difference in democratic competence between urban, semi-urban, and rural areas ($p>0.05$), indicating that democratic

competence is geographically distributed. These findings affirm that political education and voter education are strategic instruments for promoting more substantive democracy.

Keywords: Political Education; Voter Education; Democratic Competence; 2024 General Election; Magelang Regency

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan mekanisme utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, Pemilu bukan sekadar prosedur pergantian kekuasaan, tetapi sarana pemberian legitimasi politik oleh masyarakat kepada pemerintah. Diamond (2008) menegaskan bahwa pemilu yang kompetitif merupakan kondisi niscaya bagi terwujudnya akuntabilitas demokratis, namun keberadaan pemilu saja tidak cukup menjamin kualitas demokrasi apabila tidak disertai partisipasi warga yang substantif dan bermakna.

Dahl (1989) menjelaskan bahwa demokrasi yang berkualitas memerlukan enlightened understanding — kemampuan warga memahami alternatif kebijakan dan konsekuensi dari pilihan politiknya. Prinsip ini menegaskan bahwa kualitas pemilu tidak hanya diukur dari besarnya partisipasi, tetapi juga dari kemampuan pemilih menentukan pilihan secara sadar dan mandiri. Luskin (1990) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan politik (political sophistication) merupakan prediktor paling konsisten terhadap kualitas keputusan elektoral.

Dalam praktik demokrasi Indonesia, persoalan kualitas keputusan pemilih masih menjadi tantangan serius. Aspinall dan Berenschot (2019) mendokumentasikan bagaimana praktik patronase dan klientelisme mengakar dalam demokrasi elektoral Indonesia. Muhtadi (2019) memperkirakan antara 25—33 persen pemilih terlibat dalam transaksi politik uang pada Pemilu 2014. Meski tingkat partisipasi nasional Pemilu 2024 mencapai 81 persen (KPU RI, 2024), hal ini

belum otomatis mencerminkan peningkatan kualitas keputusan politik. Survei Lembaga Penelitian Masyarakat Madani (2021) menunjukkan mayoritas masyarakat tidak tertarik mengikuti berita politik.

Upaya peningkatan kapasitas warga dilakukan melalui pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011, pendidikan politik merupakan proses pembelajaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. Sementara itu, UNDP (2004) mendefinisikan pendidikan pemilih sebagai upaya sistematis meningkatkan pemahaman warga tentang sistem pemilu dan mendorong partisipasi yang terinformasi. Namun dalam praktiknya, Surbakti (2010) mencatat bahwa partai politik masih kerap memaknai kampanye sebagai pendidikan politik, sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung optimal.

Kabupaten Magelang menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan ini. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu RI 2024, wilayah ini termasuk daerah dengan potensi kerawanan konflik politik. Angka kemiskinan masih mencapai 10,96 persen atau sekitar 144,49 ribu jiwa (BPS Kab. Magelang, 2023), dan rata-rata lama sekolah hanya 7,82 tahun (BPS, 2023) — menempatkan Kabupaten Magelang pada peringkat kedua terendah di kawasan eks-Karesidenan Kedu. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Magelang sebagai laboratorium empiris yang tepat untuk menguji apakah pendidikan politik dan pendidikan pemilih benar-benar meningkatkan kompetensi demokratis warga.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan: (1) Bagaimana pengaruh pendidikan politik terhadap kompetensi

demokratis pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang? (2) Bagaimana pengaruh pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokratis pemilih? (3) Bagaimana pengaruh keduanya secara simultan?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik dipahami sebagai proses pembelajaran yang membentuk kesadaran, pengetahuan, dan sikap warga negara terhadap sistem politik. Almond dan Verba (1963) dalam *The Civic Culture* menegaskan bahwa stabilitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh orientasi kognitif, afektif, dan konatif masyarakat terhadap sistem politik. Surbakti (2010) mendefinisikan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga dalam kehidupan bernegara. Galston (2001) membuktikan bahwa pendidikan kewargaan yang efektif meningkatkan pengetahuan politik, kepercayaan terhadap institusi demokrasi, dan partisipasi politik warga secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pendidikan politik dioperasionalisasikan melalui empat dimensi: pengetahuan sistem politik, kesadaran politik, sikap demokratis, dan partisipasi kognitif.

2. Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih berfokus pada konteks elektoral dan bertujuan mempersiapkan warga dalam menggunakan hak pilih secara rasional. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 mendefinisikannya sebagai penyampaian informasi untuk meningkatkan wawasan, pemahaman, dan kesadaran pemilih. Norris (2011) menegaskan bahwa efektivitas pendidikan pemilih bergantung pada kedalaman dan konsistensi program — program yang bersifat episodik hanya menghasilkan peningkatan jangka pendek pada aspek prosedural. UNDP (2004) menekankan bahwa pendidikan pemilih yang efektif melampaui sosialisasi prosedural menuju penguatan kapasitas

evaluatif pemilih. Dimensi operasional dalam penelitian ini meliputi: pengetahuan teknis pemilu, informasi peserta pemilu, dan pemahaman hak pilih.

3. Kompetensi Demokratis Pemilih

Kompetensi demokratis pemilih berpijak pada konsep Dahl (1989) tentang *enlightened understanding* — kondisi ketika warga memiliki pemahaman memadai untuk menilai alternatif pilihan sebelum memilih. Dahl (1998) menambahkan bahwa otonomi politik — di mana pilihan lahir dari pertimbangan individu, bukan transaksional — merupakan prasyarat demokrasi yang berkualitas. Dalam penelitian ini, kompetensi demokratis dimaknai sebagai kapasitas individu menggunakan hak pilih secara sadar, rasional, dan otonom, yang dioperasionalisasikan dalam delapan dimensi: pemahaman politik, evaluasi rasional, otonomi pilihan, resistensi transaksional, orientasi kepentingan publik, konsistensi pilihan, rasionalitas informasi, dan tanggung jawab politik.

4. Tipologi Pemilih

Untuk memperkaya pemahaman kontekstual, penelitian ini merujuk pada tipologi pemilih dalam literatur internasional. *Frontiers in Political Science* (2025) mengidentifikasi tiga tipe kognitif pemilih: pemilih tertutup yang memproses informasi secara minimal, pemilih semi-terbuka yang aktif mencari informasi namun terbatas, dan pemilih terbuka yang mengevaluasi pilihan secara sistematis. Alwi dan Ram (2024) mengidentifikasi pemilih pragmatis sebagai tipe yang menentukan pilihan berdasarkan manfaat material langsung. Mujani, Liddle, dan Ambardi (2018) mencatat bahwa pemilih di pedesaan Indonesia cenderung terikat pada figur otoritas tradisional dan hubungan klientelistik. Keempat tipe ini — kompeten-otonom, prosedural, pragmatis, dan mobilisasi — menjadi kerangka kontekstual untuk memahami problem kompetensi demokratis di Kabupaten Magelang.

5. Hipotesis Penelitian

- H1: Pendidikan Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kompetensi Demokratis Pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.
- H2: Pendidikan Pemilih berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kompetensi Demokratis Pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.
- H3: Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kompetensi Demokratis Pemilih.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatif yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui pengujian hipotesis. Populasi penelitian adalah seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Magelang pada Pemilu 2024. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10 persen, menghasilkan 91 responden yang tersebar di 21 kecamatan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling — membagi populasi berdasarkan kecamatan sebagai strata, kemudian mengalokasikan jumlah responden secara proporsional sesuai bobot DPT per kecamatan menggunakan rumus $n_i = (N_i/N) \times n$. Dalam praktik lapangan, keterbatasan akses terhadap data individual DPT dari KPU menyebabkan teknik yang diterapkan lebih mendekati accidental sampling dengan tetap menjaga proporsionalitas jumlah responden antarkecamatan. Hal ini menjadi keterbatasan metodologis yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan generalisasi temuan.

Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert 1—5. Uji validitas menggunakan Pearson Correlation (r tabel = 0,206; $n=91$; $\alpha=0,05$), dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Analisis data menggunakan

regresi linier berganda dengan IBM SPSS, didahului uji asumsi klasik: normalitas (Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk), multikolinearitas (Tolerance dan VIF), dan heteroskedastisitas (Scatterplot).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dengan nilai r hitung $> r$ tabel (0,206) pada semua butir. Uji reliabilitas menunjukkan Cronbach Alpha $X_1 = 0,884$, $X_2 = 0,845$, dan $Y = 0,943$ — seluruhnya melampaui nilai batas 0,60 sehingga dinyatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan sig. = 0,200 dan Shapiro-Wilk sig. = 0,362 — keduanya di atas 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance = 0,667 ($>0,10$) dan VIF = 1,449 (<10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas melalui Scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar tanpa pola tertentu, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Komparatif Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Sebelum analisis regresi, dilakukan analisis komparatif berbasis karakteristik wilayah. Kecamatan diklasifikasikan menggunakan kepadatan penduduk per km² (BPS, 2022) menjadi tiga kategori: urban (≥ 2.000 jiwa/km²; $n=18$), semi-urban (1.000—1.999 jiwa/km²; $n=48$), dan rural (<1.000 jiwa/km²; $n=21$).

Tabel 1. Hasil Uji One-Way ANOVA Berdasarkan Kategori Wilayah

Variabel	Sumber	JK	db	F	Sig.
Pend. Politik (X1)	Antar Kelompok	1,170	2	0,617	0,542
	Dalam Kelompok	79,726	84	-	-
Pend. Pemilih (X2)	Antar Kelompok	28,204	2	0,739	0,481
	Dalam Kelompok	1602,647	84	-	-
Komp. Demokratis (Y)	Antar Kelompok	0,654	2	0,882	0,418
	Dalam Kelompok	31,162	84	-	-

Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil One-Way ANOVA menunjukkan seluruh nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan pada skor X1, X2, maupun Y antara ketiga kategori wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kompetensi demokratis pemilih bersifat merata secara geografis di Kabupaten Magelang, dan menegaskan bahwa faktor substantif — yakni pendidikan politik dan pendidikan pemilih — lebih determinan daripada faktor geografis wilayah.

4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Ket.
Konstanta	6,367	2,389	-	2,665	0,009	-
Pend. Politik (X1)	0,489	0,074	0,542	6,639	0,000	Signif.
Pend. Pemilih (X2)	0,488	0,120	0,331	4,055	0,000	Signif.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Regresi (Coefficients)

Sumber: Data primer diolah (2024)

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah: $Y = 6,367 + 0,489X_1 + 0,488X_2 + e$. Berdasarkan nilai Beta yang terstandarisasi, pendidikan politik ($\beta=0,542$) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan pendidikan pemilih ($\beta=0,331$) dalam membentuk kompetensi demokratis pemilih.

Indikator	Nilai	F	Sig.	Ket.
Adjusted R ²	0,600	68,613	0,000	Signif.
R	0,781	-	-	-

Tabel 3. Hasil Uji F (ANOVA) dan Koefisien Determinasi

Sumber: Data primer diolah (2024)

5. Pembahasan

Temuan bahwa pendidikan politik berpengaruh positif dan signifikan (H1 diterima) sejalan dengan konsep Dahl (1989) tentang enlightened understanding. Pemilih yang memiliki pengetahuan sistem politik, kesadaran, dan sikap demokratis yang baik cenderung lebih mampu mengevaluasi kandidat secara rasional. Hal ini konsisten dengan proposisi Almond dan Verba (1963) bahwa orientasi kognitif yang baik mendorong partisipasi yang substantif, bukan sekadar prosedural.

Temuan terhadap pendidikan pemilih (H2 diterima) menunjukkan fenomena menarik: responden cenderung lebih memahami prosedur pemilu dibandingkan substansi program kandidat. Pola ini mencerminkan keterbatasan political literacy sebagaimana dicatat Crick (2000) dan Norris (2011) — program pendidikan pemilih yang bersifat prosedural belum cukup untuk membentuk pemilih yang mampu mengevaluasi substansi kandidat secara kritis.

Pengaruh simultan (H3 diterima) dengan Adjusted $R^2=60\%$ menunjukkan bahwa pendidikan politik dan pendidikan pemilih bekerja paling efektif ketika berjalan bersama-sama. Pendidikan politik membentuk fondasi nilai demokrasi, sementara pendidikan pemilih menyediakan pemahaman teknis elektoral. Ketika keduanya bersinergi, pemilih tidak hanya tahu bagaimana memilih, tetapi juga mengapa dan siapa yang dipilih.

Temuan analisis komparatif wilayah yang menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antar kategori wilayah (urban/semi-urban/rural) memiliki implikasi penting: program pendidikan pemilih KPU telah

menjangkau seluruh wilayah secara relatif merata. Temuan ini sejalan dengan argumen Mujani, Liddle, dan Ambardi (2018) bahwa pemilih Indonesia semakin berkembang menjadi critical citizens yang tidak dapat disederhanakan berdasarkan dikotomi urban-rural. Sementara itu, 40 persen variasi yang tidak terjawab oleh model menunjukkan peran faktor-faktor lain seperti media sosial, tingkat pendidikan formal, dan lingkungan sosial-politik yang perlu diteliti lebih lanjut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik empat kesimpulan utama. Pertama, pendidikan politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi demokratis pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang ($B=0,489$; $t=6,639$; $\text{sig.}=0,000$), dengan kontribusi relatif lebih besar dibandingkan pendidikan pemilih berdasarkan nilai Beta ($\beta=0,542$). Kedua, pendidikan pemilih berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi demokratis pemilih ($B=0,488$; $t=4,055$; $\text{sig.}=0,000$), meskipun masih lebih efektif pada dimensi prosedural dibandingkan substansi evaluasi kandidat. Ketiga, secara simultan keduanya berpengaruh signifikan ($F=68,613$; Adjusted $R^2=0,600$), menjelaskan 60 persen variasi kompetensi demokratis pemilih. Keempat, analisis One-Way ANOVA menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan kompetensi demokratis antara wilayah urban, semi-urban, dan rural, mengindikasikan distribusi kompetensi yang merata secara geografis.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya penguatan substansi program pendidikan politik oleh partai politik melampaui pendekatan seremonial, serta

pengembangan program pendidikan pemilih oleh KPU yang tidak hanya menekankan aspek prosedural tetapi juga kapasitas evaluatif pemilih terhadap visi, misi, dan program kandidat. Penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel media sosial, pendidikan

formal, dan faktor lingkungan sosial-politik sebagai variabel kontrol, serta menggunakan desain mixed methods untuk memahami mekanisme pembentukan kompetensi demokratis secara lebih mendalam.

F. DAFTAR REFERENSI

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
- Alwi, A., & Ram, S. W. (2024). Community typology and voting behavior in elections: A political sociology perspective. *Buletin Poltanesa*, 25(2), 282–289. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v25i2.3190>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Ayu, P. (2015). Sosialisasi pemilu dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 45–58.
- Bawaslu RI. (2024). *Indeks Kerawanan Pemilu 2024*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- BPS Kabupaten Magelang. (2023). *Kabupaten Magelang dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Magelang. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Crick, B. (2000). *Essays on citizenship*. Continuum.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
- Diamond, L. (2008). *The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world*. Times Books.
- Frontiers in Political Science. (2025). Decision-making process in voting during the 2024 election in Indonesia: A study in Bandung Regency. *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1647672>
- Galston, W. A. (2001). Political knowledge, political engagement, and civic education. *Annual Review of Political Science*, 4(1), 217–234.
- KPU RI. (2024). *Rekapitulasi hasil Pemilihan Umum 2024*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Luskin, R. C. (1990). Explaining political sophistication. *Political Behavior*, 12(4), 331–361.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). *Voting behavior in Indonesia since democratization: Critical democrats*. Cambridge University Press.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Niqmah, S., dkk. (2024). Pendidikan politik dan perilaku memilih rasional. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 8(1), 12–27.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.

-
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Pradhanawati, A., Tawakkal, G. T. I., & Garner, A. D. (2019). Voting their conscience: Poverty, education, social pressure and vote buying in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 19(1), 19–38.
- Prasetyo, A. (2023). Efektivitas pendidikan politik partai politik. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 7(2), 88–104.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Tawakkal, G. T. I., Suhardono, W., Garner, A. D., & Seitz, T. (2017). Consistency and vote buying: Income, education, and attitudes about vote buying in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 17(3), 313–329.
- Tranggana, A. (2021). *Survei literasi politik masyarakat Indonesia*. Lembaga Penelitian Masyarakat Madani.
- UNDP. (2004). *A practical guide to voter education*. United Nations Development Programme.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.